

**PEREMPUAN MADURA DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH BERBASIS BERKELANJUTAN (SDGs)  
*Analisis SWOT Eksistensi Perempuan Madura Menuju  
Pembangunan Berbasis Berkelanjutan (SDGs)***

**Abd Hannan**

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Airlangga, Surabaya  
Hannan.taufiqi@gmail.com, 081703803741

**Abstrak**

Sejak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2015 di Rio De Janeiro, Brasil, pembangunan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki tujuan menjawab beragam krisis kemanusiaan-lingkungan era millennium (MDGs). Salah satu pokok persoalan yang menjadi perhatiannya adalah partisipasi perempuan, khususnya dalam konteks pembangunan, baik dalam skala internasional, nasional, ataupun lokal. Studi ini secara khusus memiliki tujuan dalam hal mengkaji eksistensi perempuan Madura kaitannya dalam pembangunan berbasis SDGs. Beberapa isu krusial yang menjadi fokus kajian ini meliputi; kajian perempuan Madura dalam perspektif gender, serta pembangunan Madura dalam perspektif SDGs. Kajian ini merupakan studi deskriptif melalui pendekatan kepustakaan. Adapun perspektif teori dalam kajian ini menggunakan perspektif Sosiologi, yang kemudian diikuti dengan analisis model SWOT. Temuan studi ini mendeskripsikan dinamika sosial pembangunan Madura, serta tantangan dan peluang partisipasi perempuan dalam konteks pembangunan daerah berbasis SDGs.

**Kata Kunci:** Pembangunan SDGs, Eksistensi Perempuan Madura.

**Abstract**

*Being declared in 2015 in Rio De Janeiro, Brazil, the development based Sustainable Development (SDGs) has purpose to answer*

*crisis of humanity area in millennium era (MDGs). One of the main focus problems is women participation, especially in development context whether international, national, or local. This study has special purpose in analyzing the existence of Madura women dealing with development based SDGs. Some crucial issues will be a focus on this study below; the analysis of Madura women in gender perspective. And development of Madura in perspective of SDGs. This study is descriptive study by library approach. The perspective of the theory in this study use sociology perspective by SWOT model analysis. The finding of this study describes social dynamic of Madura development, with the challenge and chance of women's participation in a context of area development based SDGs.*

**Keywords:** *Development of SDGs, the existence of Madura women.*

## **A. Pendahuluan**

Program pembangunan berkelanjutan atau yang populer dengan sebutan formal *Sustainable Development Goals* (SDGs), saat ini merupakan model pembangunan global yang dianuti oleh keseluruhan negara dunia, khususnya negara yang berada di bawah keanggotaan PBB. Dideklarasikan pada tahun 2015 di Rio De Janeiro, Brasil, pembangunan berbasis SDGs memiliki visi-misi melanjutkan dan mengembangkan sekian program pembangunan sebelumnya, yakni era pembangunan abad millennium, *Millenium Development Goals* (MDGs).<sup>1</sup>

Sebagai wujud kelanjutan era MDGs, agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) mengusung spirit perubahan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Yakni terciptanya realitas kehidupan global yang tidak saja lebih maju, berkembang, dan transformatif. Lebih dari itu, SDGs mengemban semangat besar untuk menciptakan iklim kehidupan masyarakat dunia yang mengarah pada terjaminnya hak asasi manusia, serta kesetaraan dalam rangka mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kesemuanya bermuara pada tercapainya kesejahteraan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nelti Erwandari, *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau*, dalam jurnal *Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, 2017, 23-25.

<sup>2</sup> Ishartono & Santoso Tri Raharjo, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, dalam jurnal *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2017, 164.

Dalam upaya mewujudkan perubahan tersebut, model pembangunan berkelanjutan (SDGs) memperlakukan prinsip-prinsip pembangunan universal, integratif, dan inklusif untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok, atau golongan ikut berpartisipasi dan menikmati pembangunan secara menyeluruh. Sebab itu, masalah-masalah sosial yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim sebagai efek dari ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan adalah wilayah-wilayah fundamental. Dikatakan fundamental karena sebuah pembangunan pada dasarnya harus mengembam visi universalitas, mengedepankan partisipasi lapisan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan visi universalitas tersebut, pembangunan masyarakat berbasis SDGs menanamkan perhatian cukup besar terhadap praktik-praktik diskriminatif dan dominatif, baik yang bersumber dari kekuasaan, kebijakan, ataupun karena status sosial tertentu, salah satunya menyangkut persoalan gender. Menguatnya praktik diskriminasi, kekerasan atas nama jenis kelamin dan peran sosial, serta segala macam realitas sosial yang erat kaitannya dengan pembatasan hak yang mengatasnamakan gender. Berdasarkan data *World Bank*, disebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika sebuah negara ingin membangun pemerintahan yang maju, maka setidaknya harus memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender.<sup>4</sup>

Dalam konteks pembangunan Indonesia, diskursus mengenai eksistensi perempuan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dalam banyak momentum, wacana eksistensi perempuan kerap kali muncul ke ranah permukaan, baik itu dalam bentuk kekerasan,

---

<sup>3</sup> Ita Puspita Sari, *Implementasi Pembangunan Partisipatif, Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara*, dalam *Jurnal Ekonomi (JE)*, Vol. 1, No. 1, 2016, 180.

<sup>4</sup> World Bank. *Engendering Development: Through Gender Equity in Rights, Resources, and Voice*, Berlin: Oxford University Press, 2001, 24.

pembatasan, minimnya kebebasan, atau bahkan lebih ekstrim dari itu, yakni pelecehan seksual. Ini membuktikan, kendati kran demokrasi—yang dipercaya sebagai ruang representasi keadilan dan kesetaraan gender—telah dibuka, namun dalam sisi praktisnya masih mengalami benturan. Asumsi demikian dapat dilihat dari masih maraknya diskursus perihal perempuan (gender), serta praktik-praktik diskriminasi dan subordinasi atas nama feminitas-maskulinitas.<sup>5</sup>

Jika diamati lebih mendalam, mengemukakan persoalan gender dalam dimensi pembangunan Indonesia adalah sinyal kuat bahwa masalah-masalah sosial yang ada hubungannya dengan gender tidak cukup dihadapkan pada penyelesaian secara struktural. Namun lebih dari itu, perlu diimbangi dengan pendekatan kultural. Secara struktural, aktualisasi nilai-nilai demokrasi barangkali menjadi pintu gerbang terpenuhinya hak sosial masyarakat secara berkeadilan dan berkeselimbangan, meski dalam beberapa hal masih terdapat masalah, seperti adanya peraturan tentang perempuan yang kemunculannya tanpa terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan perempuan itu sendiri, sehingga sangat mungkin berdampak negatif bagi perempuan.<sup>6</sup>

Adapun secara kultural, problem gender dapat muncul seiring kentalnya dimensi sosial masyarakat lokal yang masih berdampingan mesra dengan nilai-nilai kebudayaan bias gender, seperti patriarki, feodalisme, serta pola hubungan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi konsep hierarki.<sup>7</sup> Dalam konteks kebudayaan, problem kultural gender sangat mungkin menghambat pembangunan, karena seringkali program dan kebijakan yang diberlakukan bias pada keberpihakan dan penegasian terhadap peran sosial dan jenis kelamin tertentu.

Dalam rangka mengantisipasi itu, maka penting kiranya

---

<sup>5</sup> Joko Sutarto, *Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004*, dalam *Jurnal Komuniti*, Vol. II, No. 2, 2011, 4.

<sup>6</sup> Bambang S, E. *Otonomi Daerah Masih Mengesampingkan Peran Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan*. Vol. 2, No. 4, 2004, 187.

<sup>7</sup> Nanang Hasan Susanto, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan gender dalam budaya patriarki*, dalam *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 7, No. 2, 2015, 123. .

melakukan kajian dan pendalaman problem terkait secara kolektif. Apalagi sebagaimana dimaklumi bersama, hal-hal yang ada hubungannya dengan lokalisme—termasuk pembahasan tentang gender—, seperti kebudayaan, tradisi, dan adat merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan. Suatu agenda pembangunan hanya akan dapat terealisasikan apabila inti sebuah kebudayaan masyarakat telah diketahui dan dipahami.<sup>8</sup> Atas dasar itulah, dalam konsep sibernatika Parsonian (baca: Struktural fungsionalisme), struktur kebudayaan adalah elemen paling mendasar, dimana struktur lain seperti kepribadian, sistem sosial, ekonomi dibangun di atasnya.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan penjelasan di atas, maka kajian terhadap perempuan Madura dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui analisis SWOT mensyaratkan pada satu persoalan mendasar, yakni persoalan kebudayaan. Dalam banyak kesempatan sistem nilai dan norma masyarakat Madura masih belum dapat lepas dari kerangkeng budaya patriarki yang tidak saja diproduksi melalui adat dan tradisi, kekuasaan kelas sosial, namun juga telah mengalami proses dialektik dengan teks-teks keagamaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat dua alasan pentingnya melakukan pendalaman mengenai eksistensi perempuan kaitannya dengan agenda pembangunan Madura berbais SDGs. *Pertama*, pembangunan adalah suatu realitas sosial yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat beserta segala aspek sosialnya, meliputi; tindakan, perilaku, persepsi, interaksi sosial, serta struktur sosial masyarakat di dalamnya. Dalam konteks demikian, perempuan adalah bagian dari struktur sosial yang memiliki peran dan fungsi strategis, sehingga melibatkan mereka dalam proses pembangunan adalah hal niscaya. *Kedua*, pembangunan bukanlah kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terkait dengan dinamika

---

<sup>8</sup> Susanto Sunario, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi, 1994, 10.

<sup>9</sup> J. Goodman, Douglass&Ritser, George, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*, Cet. IV, Bantul: Kreasi wacana, 2010, 45.

<sup>10</sup> Tatik Hidayati, *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*, dalam *Jurnal Karsa*, vol. xvi no. 2, 2009, 66.

sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan keramah-tamahan. Dengan demikian, agenda pembangunan akan selalu berdampingan dengan kebudayaan. Suatu pembangunan hanya dapat dilakukan setelah berbagai masalah inti sosial budaya suatu masyarakat sudah diketahui untuk dijadikan tumpuan berbagai langkah pembangunan ekonomi dengan segala sektor teknisnya.<sup>11</sup> Dengan demikian, maka analisis SWOT dalam kajian ini dapat berkontribusi melakukan pemetaan dimensi sosial masyarakat, meliputi; peluang, tantangan, kelebihan dan kekurangan proses pembangunan. Analisis komprehensif terhadap tipologi masyarakat secara mendalam dapat menjadi acuan mewujudkan model pembangunan yang benar-benar menyeluruh, berkeadilan, dan emansipatif.

Analisis SWOT mengenai perempuan, gender kaitannya dengan agenda pembangunan daerah berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengandaikan pada tiga pembacaan; 1) Pembacaan mengenai perempuan Madura dalam sudut pandang kebudayaan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan posisi dan pengalaman perempuan, 2) Pembacaan mengenai perempuan dan gender, pembacaan ini diperuntukkan untuk melihat lebih dekat bagaimana realitas dan tipologi permasalahan gender yang sejauh ini mereka alami, 3) Pembacaan mengenai eksistensi perempuan dalam dimensi pembangunan Madura. Kajian ini ditujukan untuk melihat berbagai tantangan, peluang, kelebihan, dan kekurangan perempuan Madura dalam dinamika pembangunan daerah setempat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Eksistensi Perempuan Madura Dalam Potret Kebudayaan**

Dalam setiap kajian ke-Madura-an, barangkali terasa tidak lengkap jika di dalamnya tidak menyertakan penjelasan mengenai realitas sosial masyarakat setempat, seperti tradisi, budaya dan segenap konstruksi nilai lokalitas yang telah lama mengakar dalam diri orang Madura. Demikian karena dimensi kebudayaan Madura

---

<sup>11</sup> Susanto, *Pembangunan*, 10.

mengandung sekian banyak isu sosial strategis, menarik, unik, mengundang perhatian banyak kalangan, khususnya kalangan akademisi yang bergelut dalam bidang keilmuan sosial. Oleh karenanya, sebelum membahas lebih jauh perihal gender dan eksistensi perempuan Madura, maka terlebih dahulu akan disinggung oleh penulis sekilas tentang sosial kultural masyarakat Madura.

Sejauh ini, tradisi dan kebudayaan masyarakat Madura selain identik dengan religiustas,<sup>12</sup> pun juga identik dengan kentalnya hierarki sosial dalam bentuk kelas, status, jenis kelamin, dan peran sosial tertentu. Dalam bangunan sosial seperti ini, setiap kelas individu ataupun kelompok sosial menjalankan peran dan fungsi masing-masing berdasarkan jenjang hierarki sosial yang mereka duduki. Secara simbolis, hierarki tersebut bisa ditelusuri pada ungkapan *buppa'*, *babu*, *guru*, *ratoh*. Merujuk pada keberadaan ayah, ibu, guru dan raja ataupun pemerintah.

Secara filosofis, kebanyakan orang menafsiri ungkapan di atas sebagai standart referensi kepatuhan, yakni patuh pada orang tua, patuh terhadap guru dan patuh terhadap pemimpin, namun dalam perspektif yang lain ungkapan demikian mengandung pesan—bisa mungkin penegasan—atas kedekatan masyarakat Madura dengan nilai-nilai patriarki.<sup>13</sup> Dalam kenyataannya, konsep *buppa'* (baca: bapak) bagi kalangan masyarakat Madura adalah representasi kehadiran kelas sosial tertinggi, pemilik otoritas tunggal yang memiliki kekuasaan penuh terhadap keberadaan kelas-kelas sosial di bawahnya. Sebaliknya, perempuan dalam pandangan nilai masyarakat Madura adalah bagian keluarga yang harus dijaga, dilindungi, bahkan sebagai perjuangan laki-laki untuk memupuk harga diri di depan masyarakat.

Latief Wiyata (2003) mempertegas hegemoni hierarki masyarakat Madura melalui penjelasannya, bahwa sistem patriarki masyarakat Madura sejatinya sudah tercermin jelas melalui adanya posisi super ordinasi suami (*buppa'*/bapak) terhadap istri (*babu'*/

---

<sup>12</sup> Tatik Hidayati, *Perempuan Madura*, 74.

<sup>13</sup> A. Latief Wiyata, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura*, Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003, 1.

Ibu).<sup>14</sup> Posisi seorang suami (buppa'/bapak) yang berada pada tingkatan kelas super ordinasi berimplikasi pada sikap dan perilaku mereka yang senantiasa bersikap dominan. Sebaliknya, istri (babu'/Ibu) senantiasa didudukkan pada kelas sosial subordinat, berada di bawah kontrol pihak suami sehingga tidak memiliki keleluasaan bersikap, bertindak dan berpikir. Konsekuensinya, dalam konstruksi hubungan sosial kekeluargaan masyarakat Madura, seorang suami (buppa'/bapak) dapat mengidentifikasi dirinya layaknya raja, sedangkan istri (babu'/Ibu) dikonotasikan sebagai bawahan. Sehingga, wajar bila kemudian peran sosial seorang istri (babu'/Ibu) lebih berkutat di dunia domestik ketimbang publik. Hak dan kebebasan mereka terbatas, lebih banyak dihabiskan mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus rumah, dan mengurus keluarga. Dalam konteks kehidupan masyarakat Madura, kepatuhan hirarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai "aturan normatif" yang mengikat. Setiap bentuk pengabaian dan pelanggaran pada aturan normative tersebut akan melahirkan sanksi sosial dari lingkungan masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Mengakarnya sistem patriarki dalam diri masyarakat Madura dapat pula dilacak dari realitas sosial keagamaan. Sebagaimana dimaklumi bersama, nilai kebudayaan masyarakat Madura seringkali diidentikkan oleh banyak masyarakat dengan dimensi religiusitas, demikian tercermin jelas dalam banyak produk kebudayaan mereka.<sup>16</sup> Terdapat hubungan yang sangat kuat antara aspek kultural Madura dengan penggunaan identitas keagamaan. Sebab itu, mustahil untuk dapat mengecualikan pembicaraan tentang kebudayaan Madura dari aspek nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sampai di sini, barangkali tidak berlebihan jika dikatakan dimensi keagamaan (Islam) telah tumbuh—dalam bahasa Koentjaraningrat—layaknya mentalitas kebudayaan dalam tradisi pembangunan sistem

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>15</sup> Zainuddin Syarif, *Rekulturasi Pendidikan Islam Di Tengah Budaya Carok Di Madura*, dalam jurnal *KARSA*, Vol. 22 No. 1, 2014, 115.

<sup>16</sup> Tatik Hidayati, *Perempuan Madura*, 64.

dan struktur masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Dalam perspektif demikian, teks-teks keagamaan yang berisikan ajaran kepemimpinan, moral, dan ketundukan diri dalam beragama seringkali dijadikan alat legitimasi. Diredusir dan ditafsirkan dalam pemahaman yang memuat pesan-pesan misogenis, dikotomis dan bias kelas sosial. Sebab karenanya, dalam banyak diskursus kebudayaan masyarakat Madura, kajian-kajian ilmiah mengenai permasalahan sosial, apakah itu dalam hal sosial ekonomi, politik, budaya, atau bahkan pada ranah pendidikan sekalipun seringkali dihadapkan pada wilayah-wilayah keagamaan, serta segala bentuk relasi-relasi kekuasaan yang membentuknya, seperti pesantren, kiai, paham keagamaan (Islam) dan sebagainya. Pada tahap ini, maka teks-teks keagamaan (Islam) yang sejatinya mempunyai visi emansipasi telah mengalami—meminjam bahasanya George Luckas—proses reifikasi. Simbol-simbol kesakralan agama mengalami pergeseran menjadi produk komoditas, diperdagangkan demi melanggengkan status quo kelompok dan golongan tertentu, meski pada nyatanya mengesampingkan nilai substansial keadilan dan kesetaraan (gender).

## 2. Perempuan Madura Dalam Perspektif Pembangunan SDGs

Dalam perspektif Sosiologi Pembangunan, paling tidak terdapat tiga macam pendekatan untuk melihat dan mengkaji posisi perempuan Madura dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 1) WiD (Women in Development), 2) WaD (Women and Development) dan, 3) GaD (Gender and Development) (Mosse, 1996).

### a) *WiD (Women in Development)*

WiD (Women in Development) adalah bentuk pendekatan yang berpijak pada tujuan melakukan analisis terhadap perubahan yang dialami laki-laki dan perempuan, khususnya yang terjadi selama masa transisi era tradisional menuju modern.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia ANggota Ikapi, 1987, 32.

<sup>18</sup> Probosiwi, Ratih, *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam *Jurnal NATAPRAJA; Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2005, 44.

Pendekatan ini lebih dipengaruhi aspek modernisasi, bahwa keterbelakangan dan ketidakberdayan perempuan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat tertentu lebih dipicu oleh faktor internal, yakni berkenaan dengan keberadaan dirinya sendiri, seperti rendahnya keterampilan, minimnya pengetahuan, dan rendahnya kualitas pendidikan mereka.

Berdasarkan asumsi tersebut, problem perempuan akan dapat teratasi manakala mereka mampu menutupi masalah pendidikan yang ada dalam internal mereka. Melalui kualitas pendidikan yang bermutu, perempuan diharapkan akan dapat meningkatkan posisi mereka, serta menempatkan dirinya pada posisi-posisi strategis. Dengan demikian, mereka tidak akan lagi berperan sebagai objek pembangunan, pelaku pasif, atau sekedar penonton. Melainkan akan lebih terlibat aktif, sehingga dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam proses pembangunan daerah setempat.

Selama ini, perempuan Madura hanya dikenal oleh kebanyakan masyarakat sebagai perempuan pemilik tenaga kuat, dan etos kerja yang tinggi. Padahal, budaya pembangunan dewasa ini bukan lagi bermodalkan kekuatan dan keuletan, melainkan modal kecerdasan. Modal kuat dan etos kerja tidaklah cukup untuk bisa survive, perlu kecerdasan dan kecakapan diri, seperti penguasaan pada teknologi, penguasaan ilmu bisnis, kemampuan membangun komunikasi, dan kelihaihan membentuk jaringan. Pada tahap ini, maka transformasi kebudayaan melalui agenda modernisasi dalam internal kebudayaan perempuan Madura adalah hal niscaya. Karena—meminjam bahasa Wilbert Moore—sebuah pembangunan pada dasarnya adalah sebuah peralihan radikal dari satu jenis kebudayaan tradisional menuju jenis lain yang lebih modern.<sup>19</sup>

b) *WaD (Women and Development)*

Secara genealogis, pendekatan WaD (Women and

---

<sup>19</sup> Norman Long, *Pengantar Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, 13.

Development) pertama kali muncul pada sekitar tahun 1970an, secara teoritis pendekatan ini lebih dipengaruhi oleh keberadaan teori feminis marxian yang bertolak dari pemikiran besar besar Karl Marx, tentang eksploitasi sebagai akibat hubungan dari kelas-kelas sosial.

Secara umum, WaD (Women and Development) lebih memperhatikan posisi perempuan kaitannya hubungan mereka dalam proses pembangunan.<sup>20</sup> Demikian didasarkan pada asumsi mereka bahwa hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan tertentu seringkali berada pada posisi tidak seimbang, sehingga dengan mudah menimbulkan perlakuan-perlakuan diskriminasi dan dikotomis. Hal ini dikarenakan adanya struktur-struktur sosial, kebijakan politis dan pembagian sumber ekonomis yang tidak mengusung rasa keadilan dan keseimbangan.

Model kerja WaD (Women and Development) yang lebih menekankan pada hubungan sosial memiliki kesamaan dengan tipologi permasalahan perempuan Madura. Pada umumnya, problem eksistensi perempuan muncul bukan semata karena rendahnya kualitas pendidikan, namun turut pula melibatkan faktor eksternal. Secara umum faktor eksternal tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah, unsur keyakinan, atau bahkan tafsiran agama. Ilmu pengetahuan yang di dalamnya tidak mengusung semangat emansipasi dan objektivitas, seperti halnya muatan pembelajaran kitab kuning yang diberlakukan di kalangan pesantren.<sup>21</sup>

Dari aspek kebijakan, tidak sedikit keberadaan regulasi tentang perempuan yang penerapannya tidak melalui proses komunikasi atau sosialisasi dengan perempuan. Kebijakan seringkali didasarkan pada data-data kuantitatif, mereduksi persoalan perempuan pada sekian daftar jawaban dan deretan angka, bukan melalui interaksi langsung. Dalam hal

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>21</sup> Abd Hannan. *Madura Dalam Perspektif Budaya, Gender, Politik, Industrialisasi, dan Pendidikan*, Bangkalan: LPPPM-UTM; 2016, 34.

ketenagakerjaan misal, sampai detik ini belum ada keberanian pemerintah menyusun peraturan daerah yang memuat perlindungan hukum bagi buruh migran, khususnya yang berlatar perempuan.<sup>22</sup> Begitupun dari aspek keagamaan, sekian tafsir agama yang mengandung pandangan misoginis yang diajarkan oleh banyak lembaga pendidikan dan keagamaan. Berkaitan dengan ini, Hannan (2016) menemukan fakta, bahwa tidak sedikit lembaga-lembaga keagamaan (pesantren) memainkan peran dan fungsi strategis atas mengakarnya pendidikan bias dikotomisasi perempuan di kalangan masyarakat Madura.<sup>23</sup>

c) *GaD (Gender and Development)*

Pendekatan Gender and Development (GaD) mengisyaratkan atas gerakan pemberdayaan perempuan, mendorong perempuan lebih bersikap aktif sehingga bisa menempatkan dirinya sebagai agen perubahan (Probosiwi, 2015: 47).

Melihat perempuan sebagai agen perubahan artinya menuntut mereka mempunyai kemampuan mengorganisir diri dalam proses pembangunan. Untuk bisa mencapai titik tersebut, maka perlu keberanian mereka melepaskan berbagai atribut, simbol dan identitas yang mengisyaratkan atas kelemahan diri. Penilaian bahwa perempuan ada pada kelas sosial di bawah laki-laki perlu dihapus dan dilenyapkan, karena yang demikian hanya akan melahirkan ketidakberdayaan, kelemahan, serta dan beragam sikap, tindakan dan perlakuan yang semena-mena.

Dengan demikian, baik pendekatan Women in Development (WiD), Women and Development (WaD), ataupun Gender and Development (GaD), kaitannya persoalan perempuan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (SDGs) mengandaikan pada gerakan transformasi kebudayaan. Yakni, sebuah proses perubahan yang didasarkan pada peningkatan mutu kualitas pendidikan, penerapan kebijakan dan peraturan daerah yang

---

<sup>22</sup> Devi Rahayu & Misbahul Munir, *Altrenatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migrant Perempuan Di Madura*, dalam *Jurnal Mimbar hukum*, Vol. 24, No. 3, 10, 2012, 568.

<sup>23</sup> Abd Hannan, *Madura Dalam Perspektif*, 40.

mengusung semangat emansipasi, transformasi nilai kultural yang universal, serta bereorientasi pada pemberdayaan. Karena hanya dengan cara menstabilkan kebudayaan, politik dan keamanan, sebuah pembangunan akan berjalan secara berkesinambungan.<sup>24</sup> (Sunario, 1994: 10).

### **3. *Perempuan Madura dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan; Antara Peluang dan Ancaman***

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pembangunan berbasis SDGs adalah agenda percepatan pengadaaan sarana dan prasana yang mengusung visi berkeseimbangan, pemeliharaan lingkungan, dan penghormatan pada nilai luhur kemanusiaan. Pembangunan akan dapat dikatakan berhasil manakala dalam tataran praktisnya melibatkan semua elemen masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai lokalitas. Sebab itu, elemen paling krusial dalam proses pembangunan bukan saja berkaitan dengan profit, namun juga berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Konsep pembangunan menyeluruh mengandaikan pada model pembangunan emansipatif. Menekankan pada pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia secara universal, tidak memunculkan pandangan-pandangan dikotomis, keberpihakan pada hierarki dan tradisi patriarki. Salah satu strategi mewujudkannya adalah dengan memberlakukan hak kewajiban perempuan dan laki-laki secara terbuka. Tidak membatasi pada peran-peran tertentu yang mengacu pada jenis dan identitasnya.

Dalam kenyataannya, konstruksi kebudayaan masyarakat Madura yang kental dengan nilai-nilai hierarki telah memunculkan masalah mendasar. Berbagai persoalan gender yang berhubungan dengan ketimpangan, kekerasan, penindasan dan ketidaksetaraan adalah sekian persoalan yang seringkali bermunculan. Kondisinya pun tambah merunyam ketika dibumbui oleh relasi-relasi kekuasaan dalam bentuk institusi, ideologi, kebudayaan, dan teks-teks keagamaan. Dalam situasi seperti ini, peran perempuan mengalami

---

<sup>24</sup> Susanto Sunario, *Pembangunan Masyarakat*, 10.

penyempitan, keterbatasan dan pengekgangan, lantaran harus berhadapan dengan pandangan dikotomis dan hierarki masyarakat umum. Sehingga, hal wajar manakala dalam dinamika pembangunan masyarakat Madura, perempuan lebih cenderung sebagai objek. Senantiasa bersikap diam, pasif dan berada pada ketidakberdayaan.

Berkenaan dengan pembacaan di atas, berikut merupakan analisis SWOT berkenaan dengan dinamika pembangunan daerah Madura ke depan, khususnya dalam konteks pembangunan SDGs, sekaligus potret eksistensi masyarakat kalangan perempuan setempat berdasarkan kultur sosial yang saat ini tengah mengakar dalam sistem dan struktur sosial masyarakat Madura.

a) Kekuatan

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, menyebut nama Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, ataupun Sumenep barangkali tidak akan ada yang banyak tahu. Namun, ketika menyebut makanan Sate Madura, Pulau Gili Labak, Pulau Gili Yang, Kerapan Sapi, Tanian Lanjheng, Tari Pecut maka pikiran mereka akan terbayang pada sebuah pulau bernama Madura. tempat yang dikenal kental dengan nilai religiusitasnya yang tinggi.

Selain dikenal sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai normative religius, Madura juga dikenal dengan beragam kekayaan alam-sosial yang begitu melimpah dan beraneka ragam. Dalam hal eksotisme alam misalnya, terdapat banyak destinasi wisata di Pulau Madura yang sekarang ini menjadi tujuan kaum pecinta alam, pelancong dan wisatawan. Seperti Gili Labak di Sumenep yang dijuluki sebagai the hidden paradise, kemudian ada pula Gili Yang yang memiliki kadar oksigen terbaik dunia. Puncak bukit di Sumenep, Kraton Kerajaan di Sumenep, Batu Ampar di Pamekasan, Api Abadi di Pamekasan, serta Martajasah di Bangkalan.

Selain kaya akan wisata alam, Madura juga mempunyai ragam kebudayaan yang tak kalah terkenalnya dengan kebudayaan daerah lain pada umumnya. Misal, *Kerapan Sapi*, Tari Pecut,

*Tanian Lanjeng* dan aneka nilai sosial kultural lain yang bisa ditemui di setiap daerah setempat. Sekian potensi tersebut, baik yang bersumber dari alam ataupun kultural sosial mengandung nilai 'jual' besar, sehingga akan sangat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat.

Ketika kecanggihan globalisasi dapat memberangus identitas masyarakat tertentu (baca: *neo imperialisme*), khususnya masyarakat yang masih hidup dalam taraf dunia berkembang, maka perlu upaya-upaya khusus dalam rangka melakukan *counter culture* terhadap dominasi produ-produk globalisasi. Dalam konteks inilah, sesungguhnya keberadaan nilai-nilai lokal (*localisme*) Madura bisa menjadi jawaban untuk mengendalikan, atau paling tidak mengimbangi dominasi budaya massa yang dikuasai oleh negara-negara maju. Nilai-nilai lokal tersebut bisa berupa budaya, tradisi, adat, atau produk nilai lokal lain yang memiliki orientasi berkearifan lokal. Sehingga, ketika nilai-nilai lokalitas diusung sebagai suatu yang memiliki daya tarik dan daya 'jual' yang tinggi, maka yang demikian akan menjadi satu ide strategis dalam mengawal laju globalisasi, dan. Tentunya, berpeluang besar meningkatkan laju perekonomian masyarakat setempat di tengah gempuran sistem kapitalis global.

Memunculkan budaya lokal (*localisme*) pada dasarnya dapat dipahami dalam bentuk langkah revitalisasi. Menjadikan produk daerah beserta semua nilai kekayaan daerah yang tersimpan di dalamnya menjadi suatu yang menarik, memiliki nilai jual namun tetap mengusung visi kearifan lokal. Adapun penggunaan konsep kearifan lokal merupakan bentuk penegasan, bahwa pembangunan daerah Madura melalui pemanfaatan nilai kreativitas lokal harus berlandaskan pada pemerataan, empansipasi dan berkepihakan pada kepentingan masyarakat setempat. Bukan sebaliknya, berorientasi kapitalisme yang cenderung mengeksploitasi, ataupun berkepihakan pada salah satu kelompok ataupun kelas sosial tertentu.

b) Kelemahan

Secara umum, analisis kelemahan dalam kajian ini dapat dikategorisasikan pada dua bagian, yakni kelemahan yang bersumber dari aspek kultural ataupun kebudayaan, selanjutnya adalah kelemahan yang bersumber dari aspek struktural.

Unsur kelemahan yang berasal dari aspek kultural erat kaitannya dengan sistem sosial masyarakat setempat yang belum dapat melepaskan diri dari tradisi patriarki, sistem masyarakat yang bersifat hierarkis dan berkelas. Kultur masyarakat yang demikian berakibat buruk terhadap rendahnya keterlibatan masyarakat.

Dalam kondisi demikian, pandangan-pandangan dikotomis antara feminitas dan maskulinitas yang mengakar kuat dalam sistem kebudayaan masyarakat, pada satu sisi telah menasbihkan kaum laki-laki sebagai kelas sosial dominan yang memainkan peran tunggal di ruang publik. Sebaliknya, kalangan masyarakat perempuan tidak dapat berbuat banyak. Telah mengalami keterbatasan, pembatasan, bahkan dibatasi ruang publik mereka untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan.

Adapun aspek kelemahan yang bersifat struktural mensyaratkan pada tidak terkonsepnya pembangunan secara baik dan matang, serta arah pembangunan daerah yang belum menemukan titik jelas. Postur kebijakan yang tidak mengukung prinsip berkeadilan, kesetaraan, dan terjaminnya hak keseluruhan lapisan masyarakat.

Selain menyangkut konsep pembangunan, kelemahan secara struktural dapat pula datang dari aparat birokrasi yang memegang peran struktural pemerintahan. Pada batasan-batasan tertentu, harus diakui pemerintah memainkan peran dan posisi sentral, baik itu dalam kapasitas mereka sebagai eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif. Dapat dikatakan, proses pembangunan Pulau Madura sangat bergantung pada keberadaan pemerintah masing-masing daerah dalam menjalankan fungsi dan peran mereka.

Problemnya, dalam banyak kesempatan pemerintah daerah sendiri seringkali memunculkan wacana dan kebijakan publik yang tidak selaras dengan semangat universalitas, bahkan cenderung bias gender. Misal, isu akan diterapkannya Perda Poligami oleh pemerintah daerah setempat yang beberapa bulan kemarin sempat mengemuka di kalangan masyarakat. Dapat dibayangkan, ketika peraturan tersebut benar-benar berlaku, maka yang muncul adalah ruang terjadinya hegemoni yang dapat memicu lahirnya tindakan-tindakan destruktif beratsnamakan agama dan legalitas. Dalam semangat pembangunan kekinian, tentu regulasi demikian adalah persoalan krusial, kendala besar dalam proses perwujudan pembangunan dan pengembangan daerah yang lebih maju dan berkeadilan.

c) Peluang

Belajar dari pola pembangunan daerah lain yang menerapkan model pembangunan kearifan lokal, seperti daerah istimewa Jogjakarta, Bali, dan Surakarta, dapat dikatakan pembangunan daerah Madura sejatinya memiliki peluang cukup besar. Terlebih lagi Madura sendiri mempunyai Modal kekayaan eksotisme alam yang cukup melimpah, serta kreativitas nilai-nilai lokal yang beraneka ragam.

Potensi pengembangan dan pembangunan daerah Madura sesungguhnya dapat digerakkan dari segala sektor. Eksplorasi migas, pengembangan sektor pariwisata, atau bahkan mendirikan sektor industri sebagaimana terjadi di beberapa daerah sekitar Madura, Surabaya misalkan.

Hanya saja, untuk menjalankan proyek pembangunan Madura, penting kiranya mempertimbangkan tipologi daerah setempat. Apalagi sebagaimana banyak dipahami masyarakat umum, bahwa tipologi masyarakat Madura identik dengan religiusitas dan *localisme*. Untuk saat ini, sektor paling memungkinkan dan menjanjikan ada pada pengembangan dan pemanfaatan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata sangat beralasan, mengingat Madura sendiri memiliki panorama

alam yang menakjubkan, serta nilai kultural lokal yang khas dan unik.

Berkaca pada tren industri sektor pariwisata dunia, pengembangan perekonomian dari sektor pariwisata saat ini tengah populer, mejadi lahan bisnis yang menjanjikan. Bahkan, untuk kegiatan pariwisata sendiri terdapat gejala pergeseran motivasi pariwisata dari wisata dunia artifisial ke wisata natural, wisata hiburan dan permainan perkotaan ke wisata alam pedesaan, pantai dan eksplorasi kepulauan. Dengan memanfaatkan sektor *localisme* dan kekayaan alam setempat, seluruh masyarakat Madura dapat ikut berpartisipasi secara langsung. Dengan begitu, maka ada harapan memperbaiki perekonomian masyarakat Madura.

Namun demikian, untuk dapat mencapai semua itu, perlu melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Mangadakan pelatihan, pendampingan, serta pembinaan masyarakat. Selain berfungsi untuk membentuk masyarakat Kelompok Sadar Pariwisata (POKDARWIS), upaya demikian dapat pula menstimulus masyarakat agar senantiasa aktif mengasah keterampilan dan kreativitas diri. Seperti, menggalakkan ekonomi kreatif pada kalangan ibu rumah tangga, pemberdayaan keterampilan diri untuk dapat menghasilkan kerajinan tangan khas daerah setempat, Batik Madura misalkan.

#### d) Ancaman

Beberapa ancaman yang dimungkinkan muncul dalam proses pembangunan daerah Madura berbasis SDGs dapat datang dari dua aspek, yakni aspek internal dan eksternal.

Dari aspek eksnternal, ancaman dalam proses Pembangunan Madura dapat berupa model pengembangan dan pembangunan daerah yang berlandaskan praktik kapital. Kapitalisasi mensyaratkan pada pemanfaatan kekayaan dan potensi alam-sosial daerah yang cenderung eksploitatif, tidak mengusung semangat kearifan lokal. Kakayaan alam-sosial daerah setempat dieksplorasi sebesar mungkin, dan pada saat

bersamaan tidak ada perhatian terhadap keberadaan masyarakat setempat. Dengan arti lainnya, masyarakat lokal sekedar menjadi penonton di tanah kelahiran mereka, sedangkan kekayaan alam-sosial mereka dieksplorasi, kemudian di bawa lari ke daerah lain. Kapaitalisasi model demikian merupakan representasi praktik neo kapitalisme yang bersumber pada kekuatan otoritas dan permodalan.

Adapun anacam dari sektor internal berakar dari cara pandang masyarakat lokal, di mana mereka dengan cepat mengalami pergeseran nilai, dari nilai idealis-humanis berubah menjadi menjadi materialistis-hedonis. Masyarakat yang terjangkit virus ini akan memiliki kecenderungan untuk mereduksi kekayaan alam-sosial mereka dengan kepentingan profit. Sehingga dengan cara pandang demikian tidak ada lagi yang namanya nilai dan norma. Apa yang disebutnya sebagai kesadaran dan kenyataan mengalami reduksi pada entitas materi dan kebutuhan hedonis. Cara pandang demikian berpotensi besar merusak lingkungan alam, karena akan menyebabkan tereksploitasinya alam secara besar-besaran.

### C. PENUTUP

Agenda pembangunan berkelanjutan atau yang populer dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah resmi dideklarasikan. Sebagai negara yang tergabung di dalamnya, sudah merupakan keharusan bagi Indonesia untuk ikut terlibat. Berperan aktif mewujudkan wajah pembangunan global yang berkeadilan dan berkeeseimbangan.

Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan yang mampu menghadirkan hak dan kewajiban masyarakat secara menyeluruh. Mengusung semangat universalitas, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta yang terpenting lagi adalah memperjuangkan nilai-nilai emansipasi. Semangat emansipasi mensyaratkan atas kebebasan dan keleluasaan, baik dalam berpikir, bertindak, bersikap, atau pun bersuara. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan hak atas nama identitas, jenis kelamin atau peran sosial

tertentu, termasuk di dalamnya menyangkut aksistensi perempuan. Dengan demikian, persoalan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender adalah satu dari sekian fokus persoalan utama. Karena dalam kenyataannya, persoalan gender memainkan peran strategis dan sentral dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah pembangunan.

Berkenaan dengan dinamika pembangunan masyarakat Madura yang mengusung visi berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT mengenai eksistensi Perempuan Madura kaitannya dengan pembangunan daerah berbasis SDGs mensyaratkan pada poin-poin berikut:

*Pertama*, beberapa keunggulan daerah Madura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai instrument pembangunan berbasis berkelanjutan (SDGs) terletak pada tipologi daerah Madura yang mempunyai sumber kekayaan alam yang eksotik, indah, serta beragam kebudayaan lokal yang beraneka ragam. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan model pembangunan yang berkeadilan dan berkemajuan, keunggulan tersebut harus diimbangi dengan distribusi regulasi yang universal. Dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, tanpa harus terjebak pada kepentingan kelas atau golongan sosial tertentu. Tidak boleh ada praktik dominasi yang mengatasnamakan kelas, kelompok, golongan sosial. Apalagi jika kemudian berdasarkan jenis kelamin tertentu. Spirit emansipatif harus benar-benar ditanamkan sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi.

*Kedua*, problem patriarki yang sejauh ini mengakar dalam sistem nilai dan kebudayaan masyarakat Madura, khususnya kalangan perempuan menjadi salah satu titik kelemahan paling krusial. Sistem nilai patriarki menciptakan pola hubungan sosial yang tida berimbang, bahkan cenderung hierarkis. Praktik dominasi atas nama jenis kelamin, di mana masyarakat kelompok laki-laki memiliki keleluasaan dan kebebasan di ruang publik. Sebaliknya, kelompok masyarakat perempuan tidak dapat berbuat banyak, lantaran ruang gerak mereka mengalami penyempitan pada ranah domestikasi.

Selain faktor sistem nilai kebudayaan patriarki, kelamahan lainnya juga muncul dari rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat, khususnya kalangan perempuan. Kualifikasi pendidikan yang rendah, serta minimnya wawasan menjadi faktor paling dominan. Sebab karenanya, perlu adanya program yang berorientasikan pemberdayaan masyarakat (perempuan) melalui penguatan sektor pendidikan sebagai langkah solutif mengatasi kelemahan tersebut. Pada tahap ini pemerintah daerah setempat harus menjamin asupan pendidikan berkualitas pada masyarakat secara menyeluruh, termasuk kepada perempuan. Dengan pendidikan yang berkualitas, perempuan diharapkan akan dapat meningkatkan posisi mereka, serta menempatkan dirinya pada posisi-posisi strategis. Sehingga mereka tidak akan lagi berperan sebagai objek pembangunan, pelaku pasif, atau sekedar penonton. Melainkan akan lebih terlibat aktif. Dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam proses pembangunan daerah setempat.

*Ketiga*, peluang pengembangan daerah Madura dalam konteks pembangunan global berbasis SDGs terletak pada tipologi daerah Madura yang kaya akan eksotisme alam dan keunikan nilai kebudayaan masyarakat lokal setempat. Tren menggeliatnya sektor pariwisata dunia yang saat ini tengah merambah negara-negara dunia merupakan momentum besar. Apalagi motivasi para wisatawan saat ini tengah mengalami pergeseran, dari wisata hiburan perkotaan ke wisata alam natural.

*Keempat*, di tengah menggeliatnya eksplorasi kekayaan alam, baik itu dalam bentuk kegiatan sektor industri ataupun pariwisata, muncul kekhawatiran jika nanti pola pembangunan daerah akan cenderung bersifat kapital. Problem kapitalisasi dalam agenda pembangunan Daerah Madura sangat mungkin terjadi, mengingat selama ini pembangunan seringkali memuat kepentingan profit kapitalis. Persoalan kapitalisasi merupakan satu-satunya ancaman paling serius, kapitalisasi akan menyebabkan pada eksploitasi kekayaan alam-sosial. Menimbulkan efek buruk, bukan saja pada ekosistem

alam namun juga pada keberadaan masyarakat daerah setempat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang S, E. 2004, *Otonomi Daerah Masih Mengesampingkan Peran Perempuan*. dalam *Jurnal Perempuan*. Vol. 2, No. 4.
- Erwandari, Nelti, 2017, *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau*, dalam *jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3.
- Geertz, Clifford, 1989, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hannan, Abd, 2016 *Madura Dalam Perspektif Budaya, Gender, Politik, Industrialisasi, dan Pendidikan*. Bangkalan: LPPPM-UTM.
- Hidayati, Tatik, 2009, *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*, dalam *Jurnal Karsa*, vol. xvi no. 2.
- Ishartono & Santoso Tri Raharjo, 2017, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, dalam *jurnal Share: Social Work*, Vol. 6, No. 2.
- J. Goodman, Douglass & George Ritser, 2010, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*, Cet. IV, Bantul: Kreasi wacana.
- Joko Sutarso, 2011, *Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004*, Dalam *Jurnal KomuniTi*, Vol. II, No. 2.
- Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia ANggota Ikapi.
- Long, Norman, 1987, *Pengantar Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nanang Hasan Susanto, 2015, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan gender dalam budaya patriarki*, dalam *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 7, No. 2, 12.
- Probosiwi, Ratih, 2005, *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam NATAPRAJA, *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Rahayu, Devi & Misbahul Munir, 2012, *Altrenatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migrant Perempuan Di*

- Madura*, dalam JurnalMimbar hukum, Vol. 24, No. 3.
- Sari, Ita Puspita, 2016, *Implementasi Pembangunan Partisipatif, Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara*, Dalam Jurnal Ekonomi, Vol .1, No.1.
- Syarif, Zainuddin, 2014), *Rekulturasi Pendidikan Islam Di Tengah Budaya Carok Di Madura*, dalam jurnal KARSA, Vol. 22 No. 1.
- SDGs Indonesia, 2017, *SDGs di Indonesia*, (<http://sdgsindonesia.or.id/index.php/apa-itu-sdgs>).
- Sunarion, susanto, 1994, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi.
- Wiyata, Latief A, 2006, *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS.
- World Bank, 2001, *Engendering Development: Through Gender Equity in Rights, Resources, and Voice*, Berlin: Oxford University Press.